Mewujudkan Magang Berkeadilan: Strategi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Magang Mahasiswa
Berbasis Pemenuhan Hak Normatif
Nelvin Alifa Rafasya, Ag. Kustulasari 81, S.Pd., M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Ringkasan Eksekutif

Magang mahasiswa menurut Pasal 1 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2024 merupakan bentuk pembelajaran yang memberi pengalaman kerja praktis untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan. Namun, pelaksanaannya di Indonesia dinilai belum adil karena masih ada praktik yang mengabaikan asas keadilan.

Penelitian ini dilakukan di Universitas Gadjah Mada dengan kuesioner yang diisi 23 mahasiswa dan wawancara mendalam terhadap 10 di antaranya, serta mempertimbangkan mitra magang, program studi, LLDIKTI, dan organisasi mahasiswa. Hasilnya menunjukkan mahasiswa kurang sadar akan hak normatifnya, pemangku kepentingan kurang serius, dan terdapat dilema yang menyulitkan kebijakan dibuat berkeadilan.

Pasal 15 dan 29 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2024 mengatur hak mahasiswa magang atas perlindungan seperti uang saku, jaminan sosial, dan transportasi. Atas dasar itu, policy paper ini merekomendasikan dua alternatif kebijakan agar perlindungan magang memenuhi indikator decent work untuk magang dari Wulansari (2025), yaitu persetujuan yang setara, upah atau uang saku, jam kerja layak, hak belajar dalam praktik kerja, dialog sosial, dan perlindungan kerja.

Alternatif pertama merestrukturisasi kebijakan makro dengan menambahkan sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya, serta mewajibkan program studi memastikan adanya kontrak kerja sama sebelum magang. Alternatif kedua memperbaiki implementasi melalui penguatan fungsi institusi pendidikan dan penyusunan panduan magang akademik yang memuat kriteria perlindungan minimum sesuai Pasal 29 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2024.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan Tinggi, Magang, Kebijakan Pelaksanaan

Mewujudkan Magang Berkeadilan: Strategi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Magang Mahasiswa
Berbasis Pemenuhan Hak Normatif
Nelvin Alifa Rafasya, Ag. Kustulasari 81, S.Pd., M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Executive Summary

According to Article 1 of Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 63 of 2024, student internships are a form of higher-education learning that provides practical, contextual workplace experience to support graduate learning outcomes. Their implementation in Indonesia, however, remains inequitable, as some practices neglect the principle of fairness.

This paper uses Gadjah Mada University as its research site. Data were collected through a questionnaire completed by 23 UGM students, 10 of whom were also interviewed in depth, and by considering relevant parties such as internship partners, academic programs, LLDIKTI, and student organizations. The findings show that students tend to be unaware of their legal rights, stakeholders lack commitment, and dilemmas complicate the formulation of equitable policies.

Articles 15 and 29 of the Regulation guarantee interns protections such as a stipend, social security, and transportation. This paper therefore proposes two policy alternatives to ensure these protections meet Wulansari's (2025) "Decent Work Indicators for Internships": Symmetrical Consent, Wages/Pocket Money, Decent Working Hours, the Right to Learn on the Job, Social Dialogue, and Workplace Protection. The first alternative restructures the macro-policy by introducing sanctions for parties that fail to fulfil their rights and obligations, and by requiring degree programs to secure a cooperation agreement before placements begin. The second improves implementation by strengthening the role of educational institutions and developing placement guidelines that incorporate fairness principles, in line with the minimum protection criteria in Article 29.

Keyword: Higher Education Policy, Internship, Implementation Policy